

Analisis Kemandirian Keuangan Berkelanjutan Pemerintah Desa Busalangga Timur Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2021-2024

Glory Getsemani Sia¹, Petrus Emanuel Rozari², Yohana Febiani Angi³

¹²³ Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Nusa Cendana University

Abstrak:

This study aims to analyze the financial independence of the Busalangga Timur Village Government for the 2021–2024 fiscal years and to identify the potentials, challenges, and obstacles that affect it. The research used a mixed-method approach combining quantitative and qualitative descriptive analysis. The results show that the village's financial independence remains very low, with an average ratio of 0.75% and an instructive relationship pattern, indicating a strong dependence on government transfers. The main potentials lie in the agricultural, fisheries, and livestock sectors. The challenges include limited innovation in managing local resources and low community participation in village economic activities, while the main obstacles are the non-operational BUMDes due to limited human resources and facilities. Strengthening local resource management and developing BUMDes are essential to enhance the village's financial independence.

Keywords: Village Financial Independence, Village Revenue, Village Potential, Challenges, Obstacles.

Copyright (c) 2025 Glory Getsemani Sia

□Corresponding author :

Email Address : glorysia209@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada era pemerintahan modern, keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Indonesia sebagai negara kesatuan menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi daerah tanpa mengurangi prinsip kesatuan nasional. Melalui penerapan asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Otonomi daerah diharapkan mampu mendorong kreativitas, inovasi, serta kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal (Shara Ningsih dkk., 2023).

Desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam pengelolaan keuangan yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam APBDes, yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, banyak desa masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan potensi lokal, terutama pada aspek Pendapatan Asli Desa (PADes). Rendahnya PADes menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan desa masih lemah,

karena sebagian besar sumber pendanaan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah (Hallan, 2019).

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Busalangga Timur, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam cukup besar di sektor pertanian dan perkebunan, kontribusi PADes terhadap total pendapatan desa masih sangat kecil. Data APBDes tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan desa berasal dari dana transfer, sementara PADes berfluktuasi bahkan sempat tidak ada pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa desa belum mampu mandiri secara keuangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Desa Busalangga Timur Tahun Anggaran 2021–2024, guna mengetahui sejauh mana kemampuan desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri serta memberikan bahan evaluasi bagi peningkatan pengelolaan keuangan desa ke depan.

a. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan (Yusri, 2020). Dalam sektor publik, konsep ini menggambarkan bagaimana pemerintah pusat sebagai prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai agen, yang kemudian bertanggung jawab kepada pusat sekaligus memenuhi kepentingan daerah. Dalam konteks kemandirian keuangan desa, teori agensi digunakan untuk memahami pendelegasian wewenang dari pemerintah daerah kepada desa dalam mengelola keuangan secara mandiri.

b. Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai adat istiadatnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa adalah entitas yang memiliki batas wilayah dan diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan landasan pemikiran berupa keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, desa dapat dipahami secara sederhana sebagai wilayah yang dihuni oleh masyarakat hukum yang berwenang mengelola urusan pemerintahan dan kebutuhan lokalnya.

c. Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

d. Anggaran

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang akan dicapai dalam suatu periode yang diungkapkan dalam ukuran finansial. Anggaran didefinisikan sebagai rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan diungkapkan dalam unit moneter yang mencakup semua kegiatan perusahaan periode mendatang (M. Fuad dkk., 2020).

e. Anggaran Sektor Publik

Menurut Sarsiti (2020), anggaran sektor publik adalah suatu rencana finansial yang didalamnya memuat jumlah biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak serta bagaimana cara mendapatkan uang mendanai rencana yang dibuat (pendapatan).

f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Pada

dasarnya anggaran pendapatan dan belanja desa adalah salah satu instrumen kebijakan yang dijadikan sebagai alat yang membantu dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah daerah (Dilliana & Herdi, 2022).

g. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Sarsiti (2020) laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang disertai perbandingan dengan anggaran dari setiap pos tersebut.

h. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan antara kinerja sebenarnya dengan kinerja yang diharapkan. Dengan diketahuinya penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja (Dilliana & Herdi, 2022).

i. Analisis Rasio Keuangan

Menurut Mahsun (2011), Analisis laporan keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi serta memahami berbagai masalah dan peluang yang terkandung dalam laporan keuangan.

j. Rasio Kemandirian

Menurut Dilliana & Herdi (2022) Rasio kemandirian merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Menurut Halim (2007), tingkat kemandirian dapat diketahui dengan cara berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

k. Potensi Desa

Menurut Tia (2021), potensi desa merupakan keseluruhan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki desa yang berfungsi sebagai modal dasar yang harus dikelola serta dikembangkan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan mendukung proses pembangunan desa.

l. Tantangan dan Hambatan

Menurut Arsyad Lincolin, dkk (2011) hambatan dalam mencapai kemandirian desa diantaranya yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
2. Infrastruktur fisik belum memadai
3. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal
4. Keterbatasan akses pasar dan pembiayaan
5. Kelembagaan lokal/ tata kelola lemah
6. Sosial kultural dan partisipasi rendah

METODE, DATA, DAN ANALISIS

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Data sekunder berupa data kuantitatif, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021-2024 serta dokumen-dokumen lain yang mendukung, data ini bersumber dari kantor Desa Busalangga Timur Kecamatan Rote Barat Laut. Data primer juga digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung dengan para informan, yakni Pemerintah Desa, Ketua BPD dan Masyarakat Desa Oelpuah.

Tabel 3. 1
Daftar Target dan Jumlah Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Hanry Deselvod Adu	Kepala Desa	1 orang

2.	Jemmy Marianus Mooy, S. Pd	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Infon Ina Henuk	Kaur Keuangan	1 orang
4.	Yusuf Henukh	Wakil BPD	1 orang
5.	Masyarakat	-	6 orang

3.3 Analisis

3.3.1 Kemandirian Keuangan Pemerintah Desa Busalangga Timur Berdasarkan Analisis Rasio

Tabel 3. 2

Rasio Kemandirian Keuangan Desa Busalangga Timur Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Desa (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Desa (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2021	-	1.311.676.883	0%	Rendah Sekali	Instruktif
2022	24.338.700	1.175.868.000	2%	Rendah Sekali	Instruktif
2023	7.796.025	1.449.628.131	1%	Rendah Sekali	Instruktif
2024	1.700.000	1.494.329.252	0%	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-rata	0,75%			Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Desa Busalangga Timur, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 3.2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Desa Busalangga Timur selama empat tahun terakhir masih berada pada kategori sangat rendah, yaitu dalam interval 0%-25%, yang menunjukkan dominasi peranan pemerintah pusat dan rendahnya kemampuan desa dalam membiayai pemerintahan serta pembangunan secara mandiri. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat karena kapasitas keuangan desa masih terbatas. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari sekertaris desa Bapak Jemmy Marianus Mooy, S. Pd yang menyatakan bahwa:

"Desa memiliki BUMDES tapi belum dijalankan, sehingga pendapatan asli desa yang diperoleh pada tahun 2021-2024 hanya berasal dari penerimaan administrasi perkawinan adat" (Sekertaris Desa, 27 Mei 2025)

3.3.2 Potensi Desa Busalangga Timur

Tabel 3. 3

Potensi Pertanian Desa Busalangga Timur

No	Komoditas	Produksi / Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Tanaman Pangan				
	Padi	931,5 Ton	911,4 Ton	931,5 Ton	905,4 Ton

	Jagung	176,4 Ton	171,4 Ton	176,4 Ton	175,4 Ton
	Kacang tanah	5 Ton	3 Ton	5 Ton	2 Ton
	Kacang Hijau	5 Ton	3 Ton	5 Ton	5 Ton
	Ubi Kayu	35,6 Ton	30,6 Ton	35,6 Ton	25,6 Ton
	Ubi Jalar	37,5 Ton	37,5 Ton	37,5 Ton	21,5 Ton
	Bawang Merah	42 Ton	37 Ton	42 Ton	25 Ton
2	Buah - Buahan				
	Semangka	20 Ton	20 Ton	24 Ton	24 Ton
	Pare	1,32 Ton	1,32 Ton	1,32 Ton	1,32 Ton
3	Perkebunan				
	Kacang Panjang	2,7 Ton	2,7 Ton	2,7 Ton	3 Ton
	Tomat	17,6 Ton	15,5 Ton	17,6 Ton	18 Ton
	Terung	1,5 Ton	1,5 Ton	1,5 Ton	2 Ton
	Kangkung	0,84 Ton	0,84 Ton	0,84 Ton	0,84 Ton
	Bayam	0,6 Ton	0,6 Ton	0,6 Ton	0,6 Ton
	Kol	4,4 Ton	3,8 Ton	4,4 Ton	5 Ton
	Pitcai	13,5 Ton	12,5 Ton	13,5 Ton	14 Ton
	Ketimun	6 Ton	4 Ton	6 Ton	6 Ton
	Buncis	3,5 Ton	3,5 Ton	3,5 Ton	3,5 Ton
	Wortel	1,89 Ton	1,77 Ton	1,89 Ton	1,77 Ton
	Cabai Merah	3,8 Ton	3,8 Ton	3,8 Ton	3,8 Ton
	Cabai Rawit	0,76 Ton	0,76 Ton	0,76 Ton	0,76 Ton

Sumber: Profil Desa Busalangga Timur Tahun 2021-2024

Berdasarkan Tabel 3.3, hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian di Desa Busalangga Timur masih menjadi sektor utama yang menopang perekonomian masyarakat. Komoditas yang dihasilkan cukup beragam, dengan padi, jagung, bawang merah, dan ubi jalar sebagai hasil pertanian unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat desa. Produksi tanaman pangan tersebut cenderung stabil setiap tahun, meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada tahun 2024. Selain itu, komoditas hortikultura seperti tomat, kol, pitcai, dan cabai merah juga menunjukkan potensi yang baik untuk dikembangkan, sejalan dengan kemampuan petani dalam mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Tabel 3. 1

Potensi Perikanan dan Peternakan Desa Busalangga Timur

No.	Komoditas	Produksi / Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Peternakan				
	Sapi	292 ekor	340 ekor	350 ekor	365 ekor
	Kerbau	-	-	-	
	Babi	153 ekor	250 ekor	270 ekor	300 ekor
	Kambing	24 ekor	45 ekor	50 ekor	65 ekor
	Ayam	427 ekor	650 ekor	890 ekor	1500 ekor
	Domba	40 ekor	60 ekor	70 ekor	95 ekor

2	Perikanan				
	Keramba	0 Ton	0 Ton	0 Ton	0 Ton
	Tambak	0 Ton	0 Ton	0 Ton	1 Ton
	Empang	0 Ton	0 Ton	0 Ton	0 ton

Sumber: Profil Desa Busalangga Timur Tahun 2021-2024

Pada Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa potensi tersebut mulai dimanfaatkan oleh masyarakat melalui kegiatan tambak yang pada tahun 2024 telah menghasilkan produksi sebesar 1 ton, meskipun masih berada pada tahap awal pengembangan. Selain itu, sektor peternakan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data, komoditas ternak seperti sapi, babi, kambing, ayam, dan domba mengalami peningkatan jumlah yang cukup besar selama periode 2021 hingga 2024.

Tabel 3. 2
Potensi Kehutanan Desa Busalangga Timur

No.	Komoditas	Produksi / Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Perkebunan				
	Kelapa	100 pohon	100 pohon	100 pohon	100 pohon
	Pisang	600 tandang	600 tandang	600 tandang	600 tandang
2	Kehutanan				
	Jati	10.000 pohon	10.000 pohon	15.000 pohon	12.000 pohon
	Mahoni	60 pohon	50 pohon	60 pohon	45 pohon
	Bambu	10 rumpun	10 rumpun	10 rumpun	10 rumpun

Sumber: Profil Desa Busalangga Timur Tahun 2021-2024

Pada Tabel 3.5, hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perkebunan dan kehutanan di Desa Busalangga Timur memiliki berbagai komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Pada sektor perkebunan, komoditas yang tercatat meliputi kelapa dan pisang dengan jumlah produksi yang stabil dari tahun 2021 hingga 2024. Sementara itu, pada sektor kehutanan, hasil penelitian mencatat keberadaan tanaman jati, mahoni, dan bambu dengan jumlah yang bervariasi setiap tahunnya.

Potensi-potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kemandirian keuangan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa yaitu Bapak Harry Deselvod Adu dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

"Potensi sumber daya alam di Desa Busalangga Timur itu ada pada bidang pertanian salah satunya yaitu tanaman hortikultura. Desa Busalangga Timur menjadi salah satu pusat penghasil tanaman hortikultura di Kabupaten Rote Ndao"
(Kepala Desa, 27 mei 2025)

Pemerintah Desa Busalangga Timur telah berupaya mengembangkan potensi desa melalui penyediaan berbagai fasilitas penunjang, namun upaya ini belum berkontribusi pada peningkatan PADes karena BUMDes yang seharusnya mengelola potensi tersebut belum berfungsi, sehingga fasilitas yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Kepala Desa Busalangga Timur yaitu Bapak Harry Deselvod Adu yang menyatakan bahwa:

"Pemerintah desa telah menyediakan berbagai fasilitas, seperti pembangunan saluran irigasi dan penyediaan alat-alat pertanian, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan sektor pertanian dan perkebunan guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya menjadi sarana untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut belum dijalankan, sehingga berbagai fasilitas yang telah disediakan belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PADes" (Kepada Desa 27 mei 2025)

Tantangan dan Hambatan Desa Busalangga Timur Dalam Mencapai Kemandirian Keuangan

Berdasarkan temuan di lapangan, desa menghadapi beberapa tantangan yang masih dapat diatasi, antara lain belum berfungsinya BUMDes, rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya kapasitas SDM, serta belum optimalnya pengelolaan potensi pertanian dan peternakan. Keterbatasan infrastruktur dan akses pembiayaan juga turut menghambat peningkatan produktivitas ekonomi desa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Kepala Desa Busalangga Timur yaitu Bapak Hanry Deselvod Adu yang menyatakan bahwa:

"Pemerintah Desa Busalangga Timur mengalami kendala dalam pengelolaan APBDes, khususnya pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kendala utama adalah belum berfungsinya BUMDes, yang seharusnya menjadi sarana pemanfaatan potensi desa. BUMDes belum dijalankan karena sulitnya merekrut pengurus akibat rendahnya partisipasi masyarakat." (Kepala Desa, 27 mei 2025)

Penelitian juga menemukan hambatan mendasar yang sulit diatasi pemerintah desa, yaitu kepemilikan sumber daya perikanan yang bersifat pribadi serta hasil pemanfaatannya yang dialokasikan untuk lembaga keagamaan. Kondisi ini membuat sebagian potensi ekonomi desa tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk meningkatkan PADes karena keterbatasan kewenangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Keuangan Pemerintah Desa Busalangga Timur Berdasarkan Analisis Rasio

Kemandirian keuangan desa menggambarkan kemampuan desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Desa Busalangga Timur pada periode 2021–2024 masih berada pada kategori sangat rendah, dengan rasio 0% pada tahun 2021, meningkat menjadi 2% pada 2022, namun turun kembali menjadi 1% pada 2023 dan kembali ke 0% pada 2024. Rata-rata rasio kemandirian sebesar 0,75% menunjukkan bahwa desa masih sangat bergantung pada dana transfer pusat maupun daerah. Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini mencerminkan bahwa desa sebagai agen belum mampu menjalankan mandat kemandirian secara optimal, sehingga peran pemerintah pusat dan daerah masih lebih dominan atau berada pada pola hubungan instruktif. Temuan ini konsisten dengan penelitian lain yang menemukan rendahnya kemandirian keuangan di berbagai desa dan daerah.

Analisis keberlanjutan keuangan desa menunjukkan bahwa secara kuantitatif desa masih belum mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri dalam jangka panjang, terlihat dari tren penurunan rasio kemandirian dan dominannya struktur pendapatan dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, secara kualitatif terdapat komitmen pemerintah desa untuk membangun kemandirian melalui upaya mengidentifikasi potensi lokal, terutama sektor pertanian dan perkebunan, serta pengelolaan melalui BUMDes untuk meningkatkan PADes. Meskipun hasilnya belum terlihat secara signifikan, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa Desa Busalangga Timur sedang berada pada fase transisi

menuju kemandirian dan keberlanjutan keuangan yang lebih baik di masa mendatang.

Potensi Desa Busalangga Timur

Desa Busalangga Timur memiliki potensi besar terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Lahan sawah seluas 15,29 hektar dan tegalan 91,10 hektar dimanfaatkan untuk menanam padi dan hortikultura seperti jagung, bawang merah, dan ubi jalar. Produksi padi yang konsisten di atas 900 ton per tahun menunjukkan bahwa sektor pangan merupakan tulang punggung ekonomi desa. Sejumlah komoditas hortikultura seperti tomat, kol, pitcai, cabai merah, serta kacang panjang dan terung juga menunjukkan produksi yang stabil dan meningkat pada tahun 2024. Namun, masih terdapat 10 hektar lahan yang belum dimanfaatkan karena pemilik berada di luar desa, serta 0,5 hektar yang belum dikelola akibat proses pengalihan kepemilikan.

Sektor perikanan turut memiliki peluang besar melalui danau seluas 7,88 hektar dan tambak 0,99 hektar yang pada tahun 2024 menghasilkan 1 ton produksi. Namun, kontribusinya terhadap PADes belum terlihat karena usaha perikanan merupakan milik pribadi dan hasilnya dialokasikan untuk kegiatan keagamaan. Selain itu, sektor peternakan berkembang pesat, terlihat dari peningkatan jumlah sapi dari 292 ekor pada tahun 2021 menjadi 365 ekor pada 2024, serta ayam dari 427 ekor menjadi 1.500 ekor.

Infrastruktur desa seperti SPBU, pos migrasi, sekolah, gereja, serta ketersediaan SDM memberikan peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi desa, meskipun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan modal, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kelembagaan desa yang masih lemah.

Secara keseluruhan, potensi desa yang besar ini dapat menjadi sumber PADes yang kuat apabila dikelola secara efektif melalui BUMDes, kerja sama usaha, maupun pengelolaan aset desa. Optimalisasi potensi tersebut sejalan dengan prinsip kemandirian desa untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah. Dengan pengelolaan yang tepat serta peningkatan kapasitas aparatur dan dukungan masyarakat, Desa Busalangga Timur memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

Tantangan dan Hambatan Desa Busalangga Timur Dalam Mencapai Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan Desa Busalangga Timur belum tercapai karena adanya berbagai tantangan dalam pengelolaan potensi desa, khususnya terkait SDM, kelembagaan, pemanfaatan sumber daya alam, serta faktor sosial budaya masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan lokal menjadi hambatan utama, terlihat dari BUMDes yang telah dibentuk sejak 2019–2020 namun belum berfungsi karena sulitnya merekrut pengurus dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat BUMDes. Rendahnya partisipasi masyarakat ini sejalan dengan teori sosial kultural yang menjelaskan bahwa resistensi terhadap perubahan dapat memperlambat proses kemandirian desa.

Hambatan besar lainnya adalah kepemilikan sumber daya perikanan yang bersifat pribadi, di mana hasilnya dialokasikan untuk kegiatan keagamaan sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber PADes karena desa tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengubah sistem tersebut. Selain itu, nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat yang cenderung mempertahankan pola lama turut menghambat pengembangan kegiatan ekonomi komersial.

Secara keseluruhan, tantangan yang bersifat internal seperti kelembagaan dan rendahnya kapasitas SDM masih dapat diatasi melalui penguatan organisasi desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun hambatan struktural seperti kepemilikan pribadi

dan faktor budaya memerlukan pendekatan jangka panjang dan persuasif. Dengan menyelesaikan tantangan yang dapat ditangani dan secara bertahap menghadapi hambatan yang lebih kompleks, desa dapat bergerak menuju kemandirian keuangan yang lebih berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Desa Busalangga Timur selama periode 2021–2024 masih berada pada kategori sangat rendah dengan rata-rata rasio 0,75%, sehingga desa belum mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri serta masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Padahal, desa memiliki potensi yang cukup besar terutama pada sektor pertanian—meliputi hortikultura, palawija, dan padi—serta potensi pendukung pada sektor perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal karena BUMDes yang seharusnya menjadi lembaga pengelola potensi desa belum berfungsi, ditambah dengan rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya kapasitas SDM, dan belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam. Selain tantangan tersebut, terdapat pula hambatan struktural dan kultural yang tidak dapat ditangani langsung oleh pemerintah desa, seperti kepemilikan pribadi atas sumber daya perikanan serta kuatnya nilai sosial budaya masyarakat, yang menyebabkan peningkatan PADes berjalan lambat.

Sejalan dengan temuan tersebut, pemerintah desa disarankan untuk memperkuat kelembagaan desa melalui pengaktifan dan optimalisasi BUMDes sebagai wadah pengelolaan usaha dan potensi lokal, serta meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi agar pemahaman dan keterlibatan warga dalam pengembangan usaha desa dapat meningkat. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak dan upaya bertahap untuk mengatasi hambatan sosial budaya juga diperlukan agar proses menuju kemandirian desa dapat berjalan lebih efektif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan studi lanjutan dengan menambahkan indikator lain seperti rasio keserasian dan rasio aktivitas, sehingga hasil penelitian dapat lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan desa.

Referensi:

- Dilliana, S. M. S. A. . k. S. . A., & Herdi, H. S. E. . M. S. . (2022). *Manajemen Keuangan Daerah Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*.
- Hallan, M. A. (2019). Analisis Keuangan Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 45–54. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1303>
- M, F. (2020). *Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M, M. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Sarsiti. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Shara Ningsih, K., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2606–2614. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi Cetakan. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).